

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Desentralisasi di Bidang Kepariwisata di Kabupaten Tanah Datar maka dari hasil penelitian peneliti menemukan permasalahan-permasalahan dalam Proses Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pariwisata Kabupaten Tanah Datar adalah Tidak jelas Perencanaan Kebijakan Kepariwisata yang pada dasarnya sebuah pembangunan dimulai dari perencanaan yang matang dari pihak terkait agar dapat terciptanya pembangunan yang terpadu, sinergis dan sistematis dengan bertumpu pada atau mempertimbangkan rencana induk pengembangan pariwisata daerah masing-masing dalam rangka Desentralisasi, permasalahan pembangunan pengembangan pariwisata tanah datar terletak pada hal tersebut dimana rencana induk pembangunan pariwisata belum ada namun rencana induk tersebut sedang dalam proses pembahasan DPRD pada tahun ini.

Permasalahan kedua yaitu Anggaran Pariwisata yang mana Sebuah Pembangunan tentu tidak terlepas dari biaya atau anggaran, pembangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembangunan pengembangan pariwisata daerah. Setiap daerah di Indonesia diberikan anggaran dari pusat sesuai dengan kriteria-kriteria daerah tersebut, kabupaten atau kota diberikan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengurus sendiri rumah tangganya terkait dengan otonomi daerah. Luas

nya kabupaten Tanah Datar menyebabkan sulitnya pemerintah daerah untuk membagi anggaran yang tersedia tersebut sehingga pada pembangunan pariwisata yang mana sector ini merupakan lahan untuk penerimaan pendapatan asli daerah hanya di fokuskan ke beberapa pengembangan objek pariwisata saja ini tentu berimbas pada matinya obyek wisata lain yang tidak difokuskan pengembangannya karena kekurangan biaya untuk pembangunannya.

Permasalahan ketiga yaitu Pembebasan Lahan (Adat) Masyarakat minangkabau terkenal teguh dengan adat istiadat. Di minangkabau tanah merupakan harta pusaka kaum yang dikelola oleh mamak yang dimandatkan oleh kemenakan. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah tidak berada pada satu tangan. Kondisi ini sering menjadi polemik dalam pelaksanaan pembangunan terutama pada saat pembebasan lahan sebab harus berurusan dengan banyak pihak.

Permasalahan selanjutnya yaitu Kurangnya Political Will yang mengacu pada Fokus sebuah pembangunan daerah sebetulnya kembali lagi kepada kepala daerah yang memimpin bisa dilihat dari visi dan misi kepala daerah tersebut bidang apa yang terlebih dahulu ingin dikembangkan oleh kepala tersebut maka otomatis bawahan atau pemda akan mengikuti perintah atasan terlebih dahulu. Pada penelitian ini ditemukan bahwa penyebab pengembangan sector pariwisata lemah adalah terkait dengan visi dan misi kepala daerah terdahulu tidak termasuk sector pariwisata didalamnya namun pada kepala daerah periode ini pembangunan sector pariwisata masuk kedalam visi dan misi yang mana saat ini dalam proses realisasi.

Permasalahan selanjutnya yaitu Tidak adanya keterlibatan Sektor Swasta dalam Proses Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tanah Datar dalam Pertumbuhan wilayah tidak terlepas dari kerjasama pelaku pembangunan (*stakeholders*) yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Hubungan yang baik antar pelaku pembangunan menimbulkan sinergi pembangunan yang sangat besar dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Swasta sebagai agent of development belum menampakkan peranannya yang cukup signifikan karena terkendala pada kebijakan dan peraturan perundangan Kabupaten Tanah Datar yang menciptakan kondisi kondusif bagi peran serta swasta dan masyarakat.

Permasalahan terakhir adalah Sumber Daya Manusia (SDM) / Pemahaman masyarakat yang rendah Berdasarkan jumlah penduduk yang ada pada kawasan perencanaan telah mendukung kegiatan wisata, namun untuk pengembangan lebih lanjut untuk menonjolkan aset budaya baik itu makanan tradisional ataupun hasil seni tangan masih sangat minim ditambah lagi pemahaman akan daerah wisata yang masih minim pengetahuan oleh masyarakat. Hal ini juga dapat menghambat pengembangan dan daya tarik pengunjung untuk membeli hasil seni dan mengunjungi obyek wisata yang ada sehingga pertumbuhan usaha-usaha pendukung masih terasa sangat lambat yang nantinya tidak dapat mengantisipasi perkembangan/ lonjakan pengunjung.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas lah yang menyebabkan pelaksanaan Desentralisasi Kepariwisataan berjalan dengan lamban di Kabupaten Tanah Datar.

6.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai hasil yang maksimal terhadap pengembangan sektor kepariwisataan yang nantinya akan berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Tanah Datar dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, baik pengaturan melalui peraturan daerah maupun melalui dukungan dana dari APBD untuk memfasilitasi setiap kegiatan pengembangan kepariwisataan.
2. Melakukan upaya meningkatkan mutu atau kualitas kinerja sumber daya di sektor wisata terutama dalam promosi melalui pemanfaatan teknologi seperti web site sejalan dengan perkembangan zaman, karena promosi bertujuan untuk memperkenalkan potensi daerah Tanah Datar kepada wisatawan yang berada di daerah lain bahkan mancanegara, sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi kabupaten Tanah Datar.
3. Bekerja sama dengan Pihak Swasta apabila terkendala dengan anggaran dalam pembangunannya sehingga dengan adanya kerja sama tersebut semua obyek wisata dapat berjalan dan terpelihara dengan baik.
4. Memberikan pemahaman-pemahaman dan pendekatan kepada masyarakat guna ikut serta untuk mensukseskan Pembangunan Pariwisata.
5. Dinas terkait dapat membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan semua pihak agar Pembangunan Pariwisata di Tanah Datar tercapai dan

sukses.

6. Diharapkan setelah penelitian ini, Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan teori dan konsep yang berbeda dan metode yang berbeda.

